

**Resolusi No. /2008 Tahun 2008**  
**Tentang Penerapan Rekomendasi Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi**

Mengingat kembali bahwa antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 rakyat Timor-Leste menjadi korban dari pelanggaran yang sistematis terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar mereka;

Mengingat bahwa pada 13 Juli 2001, setelah melewati sebuah proses konsultasi yang luas dengan masyarakat Timor-Leste, berdasarkan Peraturan UNTAET 2001/10 Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste membentuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR);

Mengingat bahwa misi CAVR adalah termasuk mengumpulkan data dan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999, dan menyiapkan rekomendasi-rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pada masa yang akan datang, sekaligus untuk merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan korban pelanggaran hak asasi manusia;

Mengingat bahwa pasal 162 dari Konstitusi RDTL meminta CAVR untuk melepaskan fungsinya sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan UNTAET 2001/10 dan bahwa kompetensi, mandat dan tujuan-tujuan CAVR selanjutnya akan ditentukan kembali oleh Parlemen bilamana dibutuhkan;

Mengingat bahwa berdasarkan Peraturan UNTAET 2001/10 sub-bagian 21.3 dari 10 Juli 2001 tentang laporan akhir CAVR untuk selanjutnya di publikasikan dalam Lembaran Negara (Official Gazette);

Mengingat bahwa pada 31 Oktober 2005 CAVR telah menyampaikan laporan akhir-nya, termasuk di dalamnya rekomendasi-rekomendasi, kepada Presiden Republik berdasarkan pada Peraturan UNTAET 2001/10 sub-bagian 21.1 sebagaimana di amandemenkan oleh Undang-Undang No. 7 bagian ke-5 pada 1 Juli 2003;

Mengingat bahwa pada 28 November 2005 sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang No. 11 sub-pasal 2.2 29 Juli 2005, Presiden Republik telah menyampaikan sebuah salinan dari laporan akhir CAVR kepada Parlemen Nasional;

Mengingat bahwa pada 20 Januari 2006, berdasarkan Undang-Undang No. 11 sub-pasal 2.3 pada 29 Juli 2005, Presiden Republik telah menyampaikan sebuah salinan dari laporan akhir CAVR kepada Secretary-General Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Dan mengingat telah dibentuknya sebuah Sekretariat Teknik Paska-CAVR ("STP-CAVR") yang didasarkan pada Instruksi Presiden No. 20 pada 20 Desember 2005;

Tetapi hingga saat ini tidak ada tindak-lanjut dari badan-badan kedaulatan Negara atas laporan akhir dan rekomendasi-rekomendasi yang di keluarkan oleh CAVR;

Dan mempertimbangkan bahwa sesuai dengan pasal 92 Konstitusi RDTL ``Parlemen Nasional adalah sebuah lembaga kedaulatan Negara.....mewakili semua masyarakat Timor-Leste, mendapatkan kekuasaan sebagai lembaga pengawasan perundang-undangan serta kekuasaan pembuatan kebijakan politik;

Mempertimbangkan bahwa laporan akhir CAVR merekomendasikan bahwa ``Parlemen Nasional harus mendukung rekomendasi-rekomendasi di dalam laporan akhir CAVR, akan memberikan tanggungjawab utama untuk mengatur dan mengawasi implementasi dan untuk mendelegasikan wewenang ini kepada komisi parlemen yang sesuai’’;

Juga mempertimbangkan bahwa komitmen Negara Timor-Leste terhadap hukum internasional sesuai dengan pasal 9 dan 23 Konstitusi RDTL, untuk mempromosikan penghormatan secara universal terhadap, dan pengakuan internasional terhadap hak asasi dan kebebasan dasar;

Mengetahui bahwa setelah belajar dari pengalaman melawan praktek pelanggaran hak asasi manusia, belajar dari pelanggaran hak asasi manusia selama perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, memberikan keadilan kepada mereka, merekonsiliasikan masyarakat Timor dan menyiapkan dukungan serta reparasi kepada korban adalah hal yang esensial untuk masa depan Timor-Leste demi pembangunan sebuah Negara yang demokratis;

Mengingat bahwa berdasarkan pasal 160 Konstitusi RDTL bahwa kejahatan berat yang dilakukan selama 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 harus di pertanggungjawabkan ke proses peradilan kejahatan pada pengadilan tingkat nasional atau internasional, dan bahwa berdasarkan pasal 163(1) Konstitusi RDTL, organisasi peradilan transisional dibentuk untuk tetap dapat beroperasi menangani kasus-kasus kejahatan yang masih tertinggal perlu untuk diselesaikan;

Menindaklanjuti pada pasal 92 Konstitusi, Parlemen Nasional agar dapat menindaklanjuti hal-hal berikut:

1. Parlemen Nasional Republik Demokrat Timor-Leste secara formal telah menerima laporan akhir CAVR, berjudul *Chega!*, serta mengetahui temuan-temuannya. Parlemen Nasional mengakui peranan penting dan hasil yang telah di capai oleh CAVR dan menekankan bahwa telah belajar dari temuan-temuan yang telah dicapai oleh CAVR dan akan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasinya.
2. Parlemen Nasional mengetahui penderitaan korban-korban dari konflik yang terjadi di wilayah Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 serta mengetahui bahwa banyak korban masih tetap menderita serta membutuhkan perhatian.
3. Parlemen Nasional akan memimpin dan mengawasi proses implementasi terhadap rekomendasi-rekomendasi CAVR, serta akan memberikan prioritas utama untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi mengenai:
  - (1) membentuk sebuah institusi baru yang tanggungjawabnya adalah termasuk didalamnya untuk mendisiminasikan laporan CAVR, penyimpanan arsip-arsip CAVR, program-program memorial dan pendidikan, dukungan terhadap implementasi rekomendasi-rekomendasi CAVR serta melaporkan secara rutin tentang pengimplementasian rekomendasi-rekomendasi tersebut;
  - (2) membentuk sebuah skema reparasi nasional untuk korban-korban dari konflik yang terjadi di wilayah Timor-Leste antara 1974 dan 1999;
  - (3) melanjutkan diseminasi laporan akhir CAVR, termasuk didalamnya memasukan ke dalam kurikulum sekolah.
4. Semua Departemen Kementrian dan institusi Negara lainnya memiliki tanggungjawab konstitusional menyangkut rekomendasi-rekomendasi CAVR (termasuk bukan hanya terbatas untuk STP-CAVR, Kantor Presiden Republik, F-FDTL, PNTL, PDHJ, dan kantor Kejaksaan Agung) diminta untuk ikut berkolaborasi dibawah kepemimpinan Parlemen Nasional dengan maksud untuk mencapai pengimplementasian rekomendasi-rekomendasi CAVR.

Parlemen Nasional juga untuk mengajak institusi-institusi non-pemerintahan di Timor-Leste, termasuk Gereja Katolik, media, partai politik, organisasi non-pemerintahan, universitas dan sekolah-sekolah swasta, untuk ikut terlibat didalam implementasi rekomendasi-rekomendasi CAVR.

5. Parlemen Nasional agar merekomendasikan kepada Kantor Kejaksaan Agung agar dapat melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi tuntutan pasal 160 Konstitusi yang mana meminta agar semua kejahatan melawan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang yang terjadi antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 dapat dipertanggungjawabkan ke pengadilan kejahatan tingkat nasional atau internasional, termasuk melalui:
  - (a) Bekerja sama dengan Team Investigasi Kejahatan Berat dari United Nations Integrated Mission in East Timor untuk menginvestigasi kasus kejahatan berat yang terjadi pada 1999;
  - (b) Mengeluarkan dakwaan untuk kejahatan 1999 dengan bantuan dari Team Investigasi Kejahatan Berat;
  - (c) Memulai investigasi dan penuntutan terhadap kasus kejahatan paling berat yang terjadi antara 1974 dan 1998 seperti yang ditemukan oleh CAVR; dan
  - (d) Melaporkan setiap tahun kepada Parlemen Nasional tentang progres kerja dari investigasi dan penuntutan-penuntutannya.
6. Sebagai bagian pelengkap dari Regulasi UNTAET no 2001/10 sub-bagian 21.3, Rangkuman Eksekutif CAVR di publikasikan sebagai dokumen tambahan untuk resolusi ini, dalam bahasa Portugis dan Tetum.

Anggota Parlemen Komisi A,